FASE E & F

Merdeka Mengajar

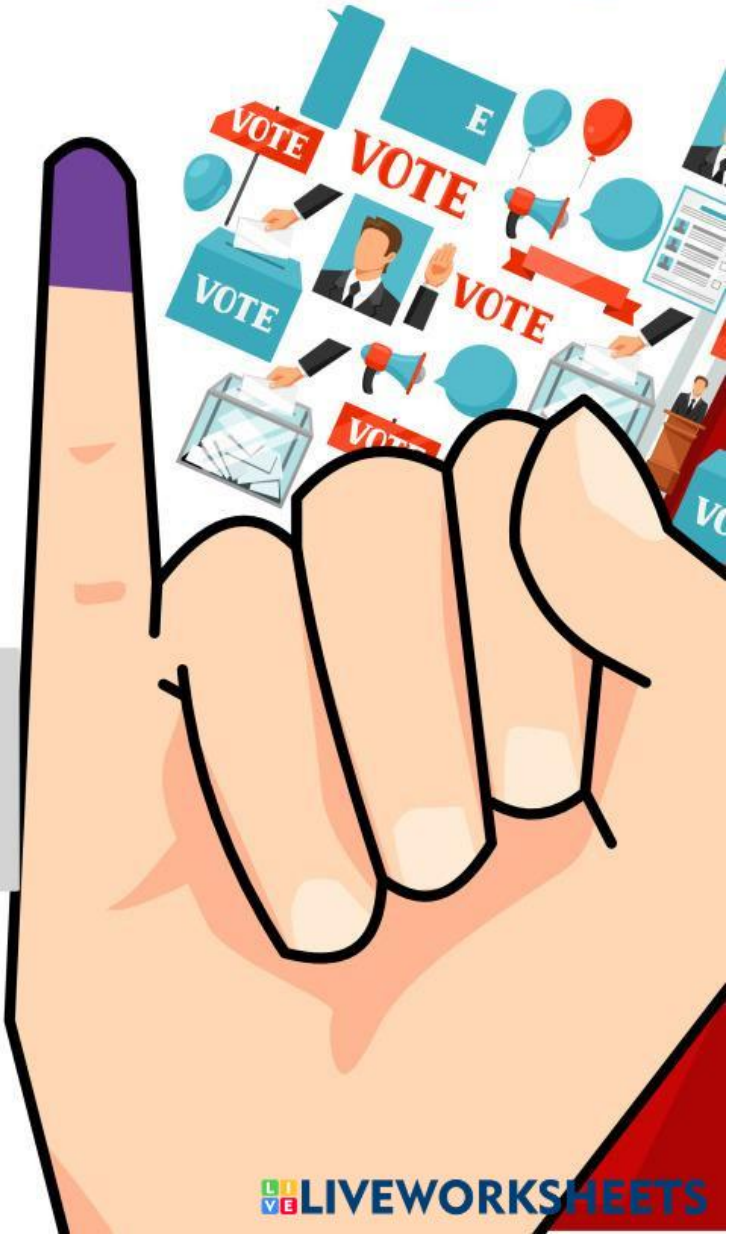
BAHAN AJAR P5

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

DEMOKRASI DI INDONESIA

2024





SENIN, 22 JANUARI 2024

Disusun oleh:

TIM PENYUSUN MODUL P5

SMA NEGERI 11 MAKASSAR

LIVEWORKSHEETS

SENIN, 22 JANUARI 2024

KEGIATAN 1

TES DIAGNOSTIC PESERTA DIDIK
P5 SUARA DEMOKRASI

Nama Peserta Didik :
Kelas :
Fasilitator Proyek :
Hari / Tanggal. :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jika ada Pemilu di Indonesia saya sangat senang, karena ?	
2	Apakah kalian sudah berhak mengikuti Pemilu ? apa alasannya?	
3	Jelaskan menurut pemikiranmu, apa yang dimaksud dengan demokrasi?	
4	Menutur kamu, mengapa harus ada demokrasi ?	
5	Menurut kalian Kepemimpinan itu apa ? jelaskan	
6	Apa yang dimaksud dengan Organisasi ?	
7	Apakah Demokrasi dapat diterapkan di sekolah ? jika dapat, sebutkan apa saja penerapan demokrasi di sekolah!	
8	Setujukah kalian jika pemilihan Ketua OSIS di SMAN 11 Makassar dilaksanakan seperti pelaksanaan Pemilu di Indonesia?	
9	Jika dilaksanakan Pemilu OSIS, nilai positif apa yang bisa peserta didik dapatkan?	

LIVEWORKSHEETS

SENIN, 22 JANUARI 2024

KEGIATAN 1

1. Wali kelas membagi menjadi 4 kelompok
2. Wali kelas meminta peserta didik menuliskan nama-nama anggota kelompoknya

1.	**4.**	**7.**
2.	5.	8.
3.	6.	9.

Perhatikan guru kalian akan menerangkan tentang tema, topik bentuk kegiatan dan penilaian pada proyek ini. pastikan kalian memahaminya. Bertanyalah dengan cara sopan tentang hal-hal yang kalian belum pahami, kami pembimbing/guru merasa sangat senang jika kalian mau bertanya dan bisa berdiskusi dengan teman-temanmu dengan baik. Melalui bertanya dan diskusi diharapkan kemampuan berpikir kritis kalian dapat terbina dengan baik dan pembelajaran demokrasi bisa pelajari dan laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Guru membimbing siswa membuat kesepakatan

Guru kalian telah menerapkan dan mengajarkan kepada kalian tentang demokrasi, pada saat membuat kesepakatan tadi guru kalian meminta seluruh siswa untuk ikut andil secara demokrasi dan memiliki hak yang sama untuk mengajukan usul dan pendapat. Selanjutnya untuk mengingat kesepakatan ini, silahkan kalian tuliskan hasil kesepakatan kelas kalian pada kegiatan projek ini pada kotak berikut ini.

LIVEWORKSHEETS

SENIN, 22 JANUARI 2024

KEGIATAN 2
PENGENALAN PROYEK P5

GAMBARAN UMUM PROYEK

Jenjang Pendidikan	: SMA
Alokasi waktu keseluruhan	: 37-40 JP
Fase capaian – Tema	: E & F - Suara Demokrasi
Waktu yang disarankan	: Januari
Dimensi Profil Pelajar Pancasila	: Bernalar Kritis, Berkebhinekaan Global
Model pembelajaran	: tatap muka
Kegiatan pembelajaran utama	: individu, berpasangan, berkelompok
Penilaian	: asesmen individu, asesmen kelompok
Jenis asesmen	: tertulis, performa
Metode	: diskusi, presentasi, demonstrasi, project, eksplorasi,
Kelengkapan perangkat ajar	: lembar kegiatan, rubrik penilaian, video/foto pancingan diskusi

Tujuan umum proyek:

Di akhir proyek, siswa diharapkan dapat:

- Menyuarakan pendapat dan mengambil bagian dalam berbagai bentuk dialog, debat, dan diskusi melalui berbagai cara dan media dengan penuh tanggung jawab
- membangun gagasan dan opini yang kuat dengan menyajikan fakta, masalah, dan keputusan secara mendalam dan berdasar pada hak asasi manusia dan sistem demokrasi.
- berpikiran terbuka pada ide dan pendapat orang lain
- berkompromi untuk menemukan jalan tengah
- berkolaborasi dengan teman, guru, dan warga sekolah lainnya
- menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

LIVEWORKSHEETS

Tujuan khusus:

Melalui kegiatan dalam modul ini, siswa diharapkan dapat:

- Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia.
- Menganalisis dampak dari keberagaman di sekolahnya.
- Menunjukkan perilaku positif dalam menyikapi keberagaman di sekolahnya.
- Mengidentifikasi sikap kesetaraan yang dilakukan diri maupun orang lain di lingkungan sekitar
- Menganalisis konsekuensi dari stereotip dan prasangka di lingkungan sekolah.
- Menjelaskan pentingnya kesetaraan sosial di sekolah.
- Menunjukkan perilaku positif dalam menyikapi perbedaan di sekolah.
- Mengidentifikasi dan mempertimbangkan alasan diri dan orang lain memiliki pendapat yang berbeda tentang isu-isu penting.
- Mengidentifikasi nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun komunitas yang demokratis.
- Memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah demokrasi di sekolah.
- Merancang program pembentukan pengurus OSIS dan pemilihan ketua OSIS yang demokratis.
- Membuat sistem pemilihan ketua OSIS yang lebih efektif

LIVEWORKSHEETS

DIMENSI, ELEMEN, SUB ELEMEN PROFIL PELAJAR PANCASILA SUARA DEMOKRASI FASE E & F

DIMENSI & ELEMEN	SUB ELEMEN	TARGET PENCAPAIAN DI AKHIR FASE E & F
Berkebinekaan Global Elemen: Berkeadilan Sosial	Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama	Berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan panduan pendidik
	Memahami peran individu dalam demokrasi	Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya. Mulai aktif mengambil sikap dan langkah untuk melindungi hak orang/kelompok lain.
Bernalar Kritis Elemen : Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan	Mengajukan pertanyaan	Mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi, serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut.
Bernalar Kritis Elemen : refleksi pemikiran dan proses berpikir	Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan	Menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda.

LIVEWORKSHEETS

PERKEMBANGAN SUB-ELEMEN ANTARFASE

BERKEBINEKAAN GLOBAL
ELEMEN : BERKEADILAN SOSIAL

SUB ELEMEN	BELUM BERKEMBANG	MULAI BERKEMBANG	BERKEMBANG SESUAI HARAPAN	SANGAT BERKEMBANG
Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama	Berpartisipa di dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama	Berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama	Berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat	Berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan panduan pendidik
Memahami peran individu dalam demokras	Memahami konsep hak dan kewajiban	Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya.	Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya. Mulai aktif mengambil sikap dan langkah untuk melindungi hak orang lain	Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya. Mulai aktif mengambil sikap dan langkah dan untuk melindungi hak orang/ kelompok lain.

LIVEWORKSHEETS

PERKEMBANGAN SUB-ELEMEN ANTARFASE

BERNALAR KRITIS

ELEMEN : MEMPEROLEH DAN MEMPROSES INFORMASI DAN GAGASAN. REFLEKSI PEMIKIRAN DAN PROSES BERPIKIR

SUB ELEMEN	BELUM BERKEMBANG	MULAI BERKEMBANG	BERKEMBANG SESUAI HARAPAN	SANGAT BERKEMBANG
Elemen Mengajukan pertanyaan	Kadang mengajukan pertanyaan	Mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi informasi	Terbiasa mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi, serta mencari tau penyebab	Mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi, serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut
Mengidenti fikasi, mengklarifi kasi, dan mengolah informasi dan gagasan	Menjelaskan asumsi yang digunakan	Menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan pada pemikirannya	Menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya	Menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda

LIVEWORKSHEETS

SENIN, 22 JANUARI 2024

KEGIATAN 3
SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA

A. AKAR-AKAR DEMOKRASI DI INDONESIA

Lahirnya demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum mencapai kemerdekaan bangsa kita sudah menerapkan asas demokrasi. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi dipandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir seluruh negara. Bagaimana dengan negara kita ? hampir bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan juga menyatakan diri diri sebagai negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Masih ingatkah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat ? , yang menyatakan "... disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ...".

Demokrasi berawal dari kata demos dan kratos yang memiliki makna pemerintahan dari rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat diwakili oleh wakil wakil rakyat sehingga dapat disebut sebagai demokrasi perwakilan. demokratis pertama kali muncul di Yunani Kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di Negara kota masa Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung dimana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga berdasarkan prosedur mayoritas. Berdasarkan UUD 1945, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi. Perkembangan demokrasi tidak terlepas dari perjuangan bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan kehidupan yang demokratis telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari, hal ini terlihat dari munculnya berbagai perkumpulan dan perserikatan pada masa pergerakan.

Pada masa kolonial Belanda, praktik demokrasi di Indonesia dalam bidang pemerintahan baru diterapkan secara terbatas pada tahun 1918 dengan dibentuknya Volksraad. Wewenang dalam Volksraad sangat terbatas. Keanggotaan Volksraad pun didasarkan pada penunjukkan Gubernur Jenderal bukan atas pilihan rakyat. KeanggotaanVolksraad banyak banyak didominasi oleh wakil-wakil dari bangsa Eropa walaupun penduduk pribumi juga dilibatkan. Volksraad sengaja didirikan, bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia melainkan hanya sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia-Belanda. Akan tetapi, beberapa aktivis pergerakan nasional memanfaatkan Volksraadsebagai wadah perjuangan untuk membela kepentingan rakyat Indonesia dan perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Bahkan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berhaluan kooperatif membentuk satu kesatuan aksi di volksraad yang disebut Fraksi Nasional yang didirikan tanggal 27 Januari 1930 berdasarkan ide Muhammad Husni Thamrin ketua perkumpulam kaum Betawi.

Pada 15 Juli 1936 diajukan sebuah petisi yang dinamakan petisi Soetardjo yang isinya mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia namun ditolak oleh pemerintah Belanda. DalamVolksraad praktik demokrasi yang dikembangkan oleh Soetardjo, M.H. Tamrin, dkk mampu mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia menjelang runtuhnya Hindia Belanda. Beralihnya kekuasaan dari Belanda ke Jepang menyebabkan bangsa Indonesia sulit mengembangkan pemikiran maupun praktik demokrasi Salah satu tonggak demokrasi di Indonesia muncul pada kongres pemuda kedua yang membuahkan hasil kesepakatan seluruh komponen pemuda Indonesia yang menyatakan untuk bersatu yang dikenal Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu kejadian penting dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Sumpah atau ikrar sejumlah pemuda inilah yang menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia karena

LIVEWORKSHEETS

KEGIATAN 3
SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA

Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Oleh sebab itulah organisasi-organisasi pemuda ini sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Dari kesepakatan inilah para pemuda ini sepakat untuk mengadakan kongres pemuda. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Kongres pemuda diadakan sebanyak dua kali, yakni Kongres Pemuda 1 yang berlangsung pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926. Sedangkan Kongres Pemuda Kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928



Gambar : Kongres Sumpah pemuda
https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pemuda

Ada tiga rapat yang dihadiri oleh para pemuda di Kongres Pemuda Kedua ini. Rapat pertama bertempat di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh Ketua PPPI, Soegondo Djojopoespito. Dalam sambutannya, Soegondo mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta kongres, dan seluruh Indonesia nantinya. Ia melanjutkan dengan menjelaskan lima factor yang bisa membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat, yakni sejarah, Bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan yang kuat.

Rapat kedua bertempat di Gedung Oost-Java Bioscoop di tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Di hari kedua ini yang jadi pembicara adalah Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah.

Rapat ketiga, sekaligus menutup kongres mengambil tempat di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106. Di sini Sunario yang menjadi pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga ini mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak bisa mendidik mereka untuk menjadi disiplin dan mandiri. Kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan dalam perjuangan menuju kemerdekaan.



Sumber Belajar Lainnya:
https://www.youtube.com/watch?v=HOasZwybaig

LIVEWORKSHEETS

KEGIATAN 3
LEMBAR REFLEKSI PESERTA DIDIK

NAMA :

KELAS / NO ABSEN :

PERTANYAAN	SANGAT SETUJU	SETUJU	TIDAK SETUJU	SANGAT TIDAK SETUJU
Aku dapat Memahami tentang pengertian Demokrasi dan penerapannya di lingkungan sekolah				
Aku paham tentang jenis-jenis Demokrasi				
Aku Paham dan dapat menjelaskan peranku dalam menerapkan demokrasi dilingkungan sekolah				
Aku dapat menjelaskan hubungan antara teori demokrasi dan implementasi atau penerapannya dilingkungan sekolah				

Hal yang masi ingin ku ketahui lebih dalam mengenai demokrasi dan penerapannya di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan negara	Hal paling menarik yang aku pelajarai sejauh ini tentang demokrasi dan penerapannya di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan negera

LIVEWORKSHEETS

SENIN, 22 JANUARI 2024

KEGIATAN 4
DEMOKRASI INDONESIA DI BERBAGAI ERA

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, demokrasi sengaja di pilih menjadi sistem yang diperuntukkan bagi pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan demokrasi, seluruh rakyat bisa turut serta dalam proses pengelolaan negara dan pemerintahan. Dengan demokrasi, seluruh rakyat bisa turut serta dalam proses pengelolaan negara.

Pada awal kemerdekaan ketika UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi setiap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan tentang peranan Negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan. Selanjutnya dengan melihat realita belum mungkin dibentuknya lembaga-lembaga Negara seperti dikehendaki UUD 1945 sebagai aparatur demokrasi, muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga MPR, DPR, DPA untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 1945 pemerintah telah mengeluarkan Maklumat Pemerintah atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam Maklumat Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi Presiden bersama-sama Menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen (Komite Nasional Pusat). Akibatnya sistem pemerintahan presidensiil berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer tanpa harus mengubah UUD 1945. Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan melainkan hanya sebagai kepala negara.

Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945-1949 yang di tandai system multi partai telah mampu meredam system politik politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan Negara. Hal itu terbukti bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet yakni Kabinet Syahrir I,II,III, Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahrir II. Setelah penyerahan kedaulatan pemerintahan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 (KMB), UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS. Negara RI berubah menjadi Negara Serikat dengan system politik parlementer. Secara konstitusional pemerintahan dengan system parlementer disebut sebagai parlementarisem konstitusional. Selama berlakunya Konstitusi RIS tidak banyak kejadian yang berkenaan dengan demokrasi dan peranan Negara. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan RIS yang hanya 8 bulan saja. Karena menunggu penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Seiring berjalannya waktu, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Bangsa Indonesia seolah baru diuji untuk mencari demokrasi seperti apa yang paling pas dan cocok dengan karakter, budaya, dan kebiasaan bangsa Indonesia.

A. DEMOKRASI LIBERAL (1945 - 1959)

Masa Demokrasi Liberal berlangsung kurun waktu 1950-1959. Pada kurun waktu ini Indonesia menganut system pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah system pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Pada masa demokrasi Liberal sering disebut sebagai zaman pemerintahan partai‖partai. Banyaknya partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet atau pemerintahan tidak berusia panjang. Pada kurun waktu ini partai politik saling berebut pengaruh untuk memegang takpuk kekuasaan. Hal tersebut berdampak pada terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan, baik politik, social, budaya, maupun pertahanan keamanan. Sistem multi partai di Indonesia diawali dengan munculnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dengan tujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Dengan munculnya banyak partai baru kemudian system pemerintahan Indonesia diganti dari presidensial menjadi parlementer. Sistem parlementer diawali dengan munculnya kabinet Sjahrir dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menterinya.

LIVEWORKSHEETS



Gambar : Sjahrir Perdana Menteri saat masa Demokrasi Liberal
https://www.zenius.net/blog/11441/biografi-sutan-syahrir

Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang‖Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen. Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur). Bila dalam perjalanannya kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang (umumnya ketua partai) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden. Sistem kabinet parlementer menunjukkan adanya persaingan antarpartai politik untuk menduduki kursi terbanyak dalam parlemen. Pada masa Demokrasi Liberal telah terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali

B. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 - 1965)

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin



Soekarno Berpidato di Depan Pejabat Tinggi Negara pada Masa Demokrasi Terpimpin
https://tirto.id/kabinet-dwikora-ii-kabinet-100-menteri-zaman-sukarno-ed23

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD.

LIVEWORKSHEETS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama. Kehidupan Soekarno menyokong pemikiran Soekarno. Kemiskinan dalam kehidupan Soekarno melahirkan buah-buah pemikiran bijaksana yang berjalan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Proses pendidikan Soekarno yang beriringan dengan tekanan kehidupannya membuat Soekarno berbeda dari peserta didik lainnya. Soekarno merupakan murid yang cerdas dan pandai dalam pendidikan. Kapasitas intelektual tersebut semakin hari semakin meningkat ketajamannya. kemudian pendidikannya dilanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) Surabaya, sebenarnya sekolah ini adalah sekolah yang sangat sulit dimasuki oleh para pribumi, namun karena Soekarno mampu membayar mahal, maka Soekarno pun masuk sekolah ini dan kemudian di sekolah ini Soekarno mengenal teori marxisme dari seorang gurunya, yaitu C. Hartough yang menganut paham sosial demokrat.

Menurut Soekarno demokrasi terpimpin merupakan jalan keluar dari kegagalan demokrasi liberal sejak tahun 1950, terbukti bahwa demokrasi liberal ternyata tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia sehingga tuntutan-tuntutan maupun dukungan untuk kembali ke UUD 1945 semakin meluas saat memasuki awal tahun 1959. PNI dan PKI sepakat dengan gagasan Presiden Soekarno, ternyata dibalik sikap politik yang menyatakan dukungan akan dikeluarkan dekrit merupakan bentuk pertarungan ideologi bahwa inilah salah satu jalan untuk dapat menerobos kekerasannya pendirian partai‖partai Islam dalam Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan UUDS 1950 menginginkan isi dari Pancasila digantikan dengan Piagam Jakarta serta dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru.

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Ia menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, ia menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan "kekuatan- kekuatan yang sedang tumbuh" di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

C. DEMOKRASI DI ERA ORDE BARU (1965 - 1998)

Setelah meletusnya peristiwa 1965, kondisi politik semakin kacau karena antara PKI maupun TNI saling tuduh tentang siapa yang berada di balik peristiwa Gerakan 30 September. Akan tetapi, karena semakin terdesak akhirnya kekuatan PKI berhasil dihancurkan. Namun demikian, gejolak politik ini menjadi pekerjaan rumah karena telah memorak-porandakan kehidupan politik secara global. Oleh karena itu, program utama yang diemban setelah lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Di depan sidang pleno DPRGR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal pemciptaan kodnsisi mental/psikologis bagi keperluan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Hal yang paling awal dilakukan untuk mengatasi kondisi politik adalah pembubaran PKI dan pembersihannya di segala aspek. Di bidang politik luar negeri, pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dan Indonesia aktif kembali di PBB terhitung sejak 28 September 1966.

Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi. Peserta ini merupakan yang terbanyak selama Orde Baru. Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Pada pemilu ini, partai-partai politik mendapat 124 kursi di DPR dan Golongan Karya mendapat 261 kursi. Sementara itu, ABRI mendapat 75 kursi.

LIVEWORKSHEETS

D. DEMOKRASI DI ERA REFORMASI (1998 - SEKARANG)

Runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru telah memberikan harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan kearah mana demokrasi akan dibangun. Langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

1. Reformasi konstitusional (constitutional reform) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.
2. Reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment), yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik
3. Pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis. Masa demokrasi di Era Reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.



Gambar: Pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI
https://kumparan.com/kumparannews/pelantikan-presiden-indonesia-dari-masa-ke-masa-1s5eZHMZ3Te/full

Demokrasi Indonesia telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga lembaga tinggi yang lain. Masa Reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis

SUMBER BELAJAR LAINNYA:

1. https://youtu.be/AXNN3eqOXqI
2. https://youtu.be/EvoSuhfLLVQ





LIVEWORKSHEETS